

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

Oleh:

Mohamad Fauji Hamidi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Berlakunya peraturan yang mengatur tentang suatu perubahan sistem pengelolaan keuangan negara yang mana diperkenalkannya pendekatan penganggaran berbasis kinerja tidak serta merta bisa segera dapat diimplementasikan pada suatu daerah dan SKPD sebagai perangkatnya. Keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, (2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus, (3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang), (4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas dan (5) Keinginan yang kuat untuk berhasil. Dengan metode total sampling terhadap 19 pejabat RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang terlibat dalam penyusunan anggaran dengan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Variabel independen penelitian ini adalah : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggung Jawaban anggaran dan Evaluasi Kinerja. dependen penelitian ini adalah : Akuntabilitas Kinerja Hasil penelitian pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa (1) Dari faktor perencanaan diketahui sebagian besar responden menyatakan kurang terlibat dalam perencanaan, (2) Dari faktor pelaksanaan sebagian responden menyatakan pelaksanaan anggaran baik, (3) Dari faktor Pelaporan diketahui sebagian besar responden menyatakan pelaporan anggaran baik, dan (4) Dari Faktor Evaluasi diketahui, sebagian besar responden menyatakan evaluasi anggaran baik. Pencapaian akuntabilitas pada RSUD dr.R.Koesma Tuban diketahui sebagian besar responden menyatakan akuntabilitas baik. Dari uji Chi Square diketahui bahwa faktor perencanaan dan pelaporan pengaruhnya rendah terhadap akuntabilitas, faktor pelaksanaan pengaruhnya agak rendah terhadap akuntabilitas, sedangkan faktor Evaluasi cukup mempengaruhi akuntabilitas

Kata kunci: Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Teori anggaran

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai dengan diawali upaya penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK).

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Seperti yang disebutkan dalam penelitian Suprasto (2006) bahwa “Anggaran berbasis kinerja juga mengisyaratkan penggunaan dana yang tersedia dengan seoptimal mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat”.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, hal ini tampak pada pengisian pengukuran indikator kinerja pada dokumen RKA maupun DPA, belum menggambarkan kaitan yang erat dengan proses pengelolaan pencapaian (*management for results*). Selain itu juga belum menggunakan standar analisis belanja, standar biaya, standar pelayanan minimal, perencanaan kinerja dan target kinerja. Hal ini disebabkan di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban belum menetapkan instrumen pengukuran capaian kinerja keberhasilan suatu program dan kegiatan. Demikian juga sumber daya manusia yang ada masih belum cukup memahami implementasi penganggaran berbasis kinerja. Masih ada beberapa kendala dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat dalam upaya peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja, karena masih belum terselenggara secara berkelanjutan dan intensif upaya menuju perbaikan penganggaran berbasis kinerja.

Selama ini pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di RSUD dr. R. Koesma masih

belum sepenuhnya akuntabel, khususnya terhadap outcome dari output suatu kegiatan. Hal ini berdasarkan pengamatan awal oleh penulis selama menjadi pegawai di RSUD dr. R. Koesma antara lain adalah adanya beberapa pekerjaan pada suatu kegiatan yang telah selesai 100% (seratus persen), tetapi tidak ada *outcome* terhadap *output* dari pekerjaan tersebut, yang artinya barang dan jasa yang merupakan realisasi dari suatu kegiatan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga manfaat dari pengadaan tersebut tidak ada. Misalnya pada tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan pengadaan LED monitor dan perlengkapannya yang bisa diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM- RS), sehingga banyak informasi yang bisa ditampilkan bagi pelanggan mulai dari jadwal tenaga medis, informasi layanan yang lain yang sangat dibutuhkan oleh keluarga pasien. Namun barang hasil pengadaan tersebut belum dimanfaatkan dan difungsikan. Kemudian kegiatan pengadaan alat/mesin fingerprint, sampai dengan saat ini mesin tersebut belum difungsikan secara optimal.

Disamping hal tersebut, masih ada kegiatan yang mana outputnya belum dimanfaatkan secara optimal, seperti pengadaan mesin parkir secara otomatis, secara operasional hal tersebut masih menimbulkan permasalahan di lapangan, yang mana petugas parkir yang ditugaskan sebagai operator nampaknya belum familiar dengan penggunaan alat tersebut.

Uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi anggaran berbasis kinerja di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban,
2. Sejauhmana pencapaian akuntabilitas kinerja pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban,
3. Apakah Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.

Sedangkan tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi anggaran berbasis kinerja di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas kinerja RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
3. Untuk menganalisis sejauhmana implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.

Tinjauan Pustaka.

Konsep Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memberikan fokus pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi, dimana setiap kegiatan yang ada tersebut harus dapat diukur kinerjanya. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Capaian hasil tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Bagaimana cara agar tujuan itu dapat dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan/pendanaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas, baik aktivitas langsung maupun tidak langsung yang mendukung program sekaligus melakukan estimasi biaya-biaya berkaitan dengan

pelaksanaan aktivitas tersebut. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja) yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja

Berdasarkan teori diatas, Anggaran berbasis kinerja adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dalam Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disetiap unit-unit kinerjanya didalam suatu instansi pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatan anggarannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat luas

Manfaat Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Dadang Solihin (2008:48) ada beberapa manfaat penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut:

1. Transparansi

Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya. Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program-program, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami.

2. Penentuan Prioritas

Pendekatan anggaran berbasis kinerja memberikan peluang kepada lembaga pembuat kebijakan seperti kabinet dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional. Hal ini terjadi karena anggaran program pemerintah tidak hanya menggambarkan pengelompokkan menurut organisasi dan jenis belanja, akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil yang diinginkan untuk dicapai. Pendekatan anggaran berbasis kinerja membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi di antara berbagai prioritas

3. Efisiensi Birokrasi

Penerapan anggaran berbasis kinerja berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi. Anggaran berbasis kinerja mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokusnya pencapaian hasil. Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggungjawab atas penyediaan layanan barang dan jasa publik, sementara kementrian/lembaga lebih difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi

Proses Penyusunan Penganggaran Berbasis Kinerja

Menurut Dedi Nordiawan (2006:79) mengemukakan tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Strategi organisasi

Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. Memiliki orientasi masa depan
- d. Menumbuhkan seluruh unsur organisasi

2. Pembuatan Tujuan

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional karena tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi

3. Penetapan Aktifitas

Penetapan strategis adalah sesuatu yang dasar dalam penyusunan anggaran karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan

4. Evaluasi dan Pengambilan keputusan

Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan karena proses ini dapat dilakukan dengan standar buku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Untuk dapat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan prestasi kerja atau Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) diperlukan sumber daya manusia yang mampu dalam pelaksanaannya. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam buku 2 pedoman penerapan penganggaran berbasis Kinerja (2009:20) langkah-langkah pokok penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategik

Untuk menyusun anggaran berbasis kinerja, kementerian negara/lembaga terlebih dahulu harus mempunyai Perencanaan Strategik (Renstra). Substansi Perencanaan Strategik (Renstra) memberikan gambaran tentang kemana organisasi harus menuju dan bagaimana cara (strategi) untuk mencapai tujuan itu.

2. Sinkronisasi

Merupakan langkah pertama yang sangat penting, yaitu sinkronisasi program dan kegiatan/subkegiatan. Langkah ini dimaksudkan untuk :

- a. Menata alur keterkaitan antara sub kegiatan, kegiatan, dan program terhadap kebijakan yang melandasinya
- b. Memastikan bahwa kegiatan/subkegiatan yang diusulkan benar-benar akan menghasilkan output yang mendukung pencapaian sasaran/kinerja program. Memastikan bahwa sasaran/kinerja program akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
- c. Memastikan keterkaitan program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

3. Penyusunan Kerangka Acuan

Setiap usulan program, kegiatan/subkegiatan yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga harus dilengkapi kerangka acuan yang menguraikan dengan jelas bagaimana program dan isinya terkait dengan upaya mencapai tujuan kebijakan yang melandasinya. Kerangka acuan harus menggambarkan :

- a. Uraian mengenai pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Satuan kerja/personel yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk mencapai output dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari kegiatan.
- c. Rincian pendekatan/metodologi dan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Uraian singkat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan (termasuk lokasi dan bagaimana dilaksanakan) serta dilengkapi dengan uraian alur pikir keterkaitan antara kegiatan/sub-kegiatan dengan program yang memayunginya
- d. Data input sumber daya yang diperlukan, terutama perkiraan biayanya.

4. Perumusan/penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah bagian penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Indikator kinerja merupakan *performance commitment* yang dijadikan dasar atau kriteria penilaian kinerja kementerian negara/lembaga. Indikator kinerja memberikan penjelasan tentang apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut :

- a. Masukan (*input*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan/subkegiatan.
- b. Keluaran (*output*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program dan atau kegiatan/subkegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan
- c. Hasil (*outcome*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program dan atau kegiatan/subkegiatan yang sudah dilaksanakan
- d. Manfaat (*benefit*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah
- e. Dampak (*impact*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat

5. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan/subkegiatan. Oleh sebab itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban kementerian negara/lembaga atas keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar akuntabilitas kinerja dapat berjalan dengan baik diperlukan sistem pengukuran kinerja dan sistem pengelolaan kinerja yang dapat bekerja secara sinergis.

6. Pelaporan kinerja

Langkah akhir dari anggaran berbasis kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan akuntabilitas kinerja menguraikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta berguna sebagai bahan evaluasi atau umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahapan Siklus Anggaran Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan disusunya Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah (SEKDA). Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan secara periodik yang mencakup:

- a. Laporan realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- c. Catatan atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran

Berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD oleh Kepala Daerah berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Pemahaman Konsep Anggaran Berbasis Kinerja

Konsep anggaran berbasis kinerja adalah perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut.

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah:

- a. Tujuan yang telah disepakati dan ukuran pencapaiannya.
- b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.
- c. Penyediaan informasi secara terus-menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi

3. Konsistensi Penerapan Anggaran

Konsistensi penerapan anggaran adalah melaksanakan penerapan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan permusan penyusunan anggaran.

4. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya. Pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh, yaitu:
 - a. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
 - b. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

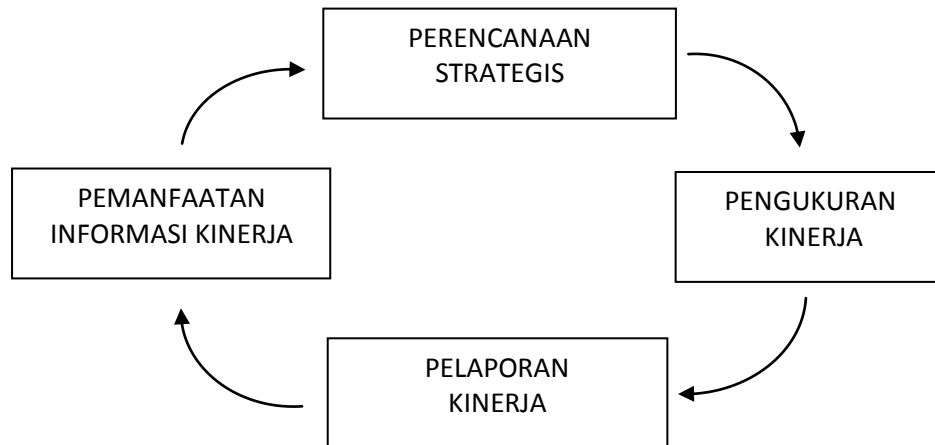
Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat. Organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai mana pada gambar berikut :



Gambar 1

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar di atas, dimulai dari penyusunan Perencanaan Strategik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran strategik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja.

Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan, metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Dimensi Akuntabilitas

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akutabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hokum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ataukah dilakukan melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dalam hal ini peneliti akan menganalisis sejauhmana penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada BLUD RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. Variabel independen penelitian ini adalah : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggung Jawaban anggaran dan Evaluasi Kinerja. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggung Jawaban anggaran dan Evaluasi Kinerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan tujuan menjelaskan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada RSUD dr.R.Koesma Kabupaten Tuban pada tahun 2015 terhadap akuntabilitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif analitik. dimana dalam penelitian ini dideskripsikan hasil pengamatan dari responden.

Teknik pengumpulan Data sekunder terkait profil rumah sakit dan tugas pokok dan fungsi pejabat struktural diadapatkan dari dokumen rumah sakit, sedangkan data primer terkait pelaksanaan anggaran berbasis kinerja menggunakan kuesioner terstruktur terdiri dari pertanyaan tertutup berupa suatu daftar pertanyaan yang diberikan atau disebarkan kepada responden untuk diisi berdasarkan persepsi masing-masing responden dengan menggunakan 72 pertanyaan untuk faktor perencanaan, 12 pertanyaan untuk faktor pelaksanaan anggaran, 3 pertanyaan untuk faktor pelaporan dan 6 pertanyaan untuk faktor evaluasi. Sedangkan pada variable dependen/ akuntabilitas menggunakan 15 pertanyaan.

Data yang terkumpul dianalisis dengan uji chi square. Uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas. Dengan akuntabilitas kinerja pada RSUD dr. R. Kosma dengan tingkat pemaknaan p kurang dari 0,05. Formulasi pemaknaan p kurang dari 0,05 artinya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas.

3. HASIL PENELITIAN

Akuntabilitas Kinerja di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

Data terkait pencapaian akuntabilitas kinerja pada RSUD dr.R.Koesma Kabupaten Tuban dijabarkan pada tabel 1

Tabel 1
Akuntabilitas Kinerja di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

| | Frekuensi | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Kurang | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| cukup | 6 | 31.6 | 31.6 | 36.8 |
| Baik | 12 | 63.2 | 63.2 | 100.0 |
| Total | 19 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber: Data Primer

Dari tabel 1 diketahui bahwa sebagian kecil responden (5,3%) menyebutkan akuntabilitas kinerja kurang, hampir setengahnya responden (31,6%) menyatakan akuntabilitas kinerja cukup dan sebagian besar responden (63,2%) menyatakan akuntabilitas baik.

Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban

Pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dianalisis dengan uji Chi Square dengan tingkat kemaknaan $\alpha = \leq 0.05$. Uji silang dilakukan terhadap hubungan antara faktor perencanaan, faktor pelaksanaan, faktor pelaporan dan faktor evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja. masing-masing akan dijelaskan pada bab berikut.

Pengaruh Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap akuntabilitas Kinerja

Pengaruh perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2
Crosstab Pengaruh perencanaan terhadap akuntabilitas

| | | | Akuntabilitas | | | Total |
|-------------|--------|----------------|---------------|-------|------|-------|
| | | | Kurang | cukup | Baik | |
| Perencanaan | Kurang | Count | 1 | 2 | 7 | 10 |
| | | Expected Count | .5 | 3.2 | 6.3 | 10.0 |
| | Baik | Count | 0 | 4 | 5 | 9 |
| | | Expected Count | .5 | 2.8 | 5.7 | 9.0 |
| Total | | Count | 1 | 6 | 12 | 19 |
| | | Expected Count | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 19.0 |

Sumber: Data Primer

Dari tabel 2 diketahui bahwa terdapat 1 (satu) orang responden yang perencanaan kinerjanya kurang dan akuntabilititas kinerjanya kurang sebanyak 2 orang responden perencanaan kinerjanya kurang akuntabilitas kinerjanya cukup dan sebanyak 7 orang perencanaan kinerjanya kurang tetapi akuntabilitas kinerjanya baik. Sebanyak 4 orang responden perencanaan kinerjanya baik dan akuntabilitas kinerjanya cukup sedangkan 5 orang responden perencanaan kinerjanya baik dan akuntabilitas kinerjanya baik. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dapat diketahui dari uji data Chi Square pada tabel 3

Tabel 3
(Uji data Chi-Square Tests) pengaruh perencanaan terhadap akuntabilitas kinerja pada RSUD dr.R.Koesma Tuban

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------|
| Pearson Chi-Square | 1.953 ^a | 2 | .377 |
| Likelihood Ratio | 2.348 | 2 | .309 |
| Linear-by-Linear Association | .025 | 1 | .873 |
| N of Valid Cases | 19 | | |

a 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .47.

Sumber: Data Primer

Pada tabel *Chi-Square test*, baris pearson Chi-Square menunjukkan harga α_0^2 1.953 (a), $df = 2$, dan $p\text{-value}=0,377 > 0,005$, artinya tidak ada pengaruh antara perencanaan anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja pada RSUD dr. R. Koesma Tuban. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan pengaruh perencanaan dengan akuntabilitas kinerja dijabarkan pada tabel 4

Tabel 4
(*Symmetric Measures*) Tingkat Keeratan hubungan anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja

| | Value | Approx. Sig. |
|---|-------|--------------|
| Nominal by Nominal Contingency Coefficient | .305 | .377 |
| N of Valid Cases | 19 | |

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis

Sumber: Data Primer

Pada tabel 4 (*Symmetric Measures*), diperoleh nilai *contingency Coefficient* sebesar 0,305 yang menunjukkan tingkat keeratan pengaruh perencanaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja rendah artinya pengaruh perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja menurut pendapat responden ini adalah rendah.

Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan disusunnya Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah.

Lemahnya keeratan hubungan antara perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa fungsi perencanaan pejabat struktural pada RSUD dr. R. Koesma lemah meskipun demikian komitmen mereka terhadap tujuan organisasi sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa meskipun mereka lemah di perencanaan tapi akuntabilitas mereka tinggi.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5
Crosstab pengaruh Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
terhadap akuntabilitas

| | | | Akuntabilitas | | | Total |
|-------------|----------------|----------------|---------------|-------|------|-------|
| | | | Kurang | cukup | Baik | |
| Pelaksanaan | Kurang | Count | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | Expected Count | .1 | .3 | .6 | 1.0 |
| | Cukup | Count | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | | Expected Count | .2 | 1.3 | 2.5 | 4.0 |
| | Baik | Count | 0 | 3 | 11 | 14 |
| | | Expected Count | .7 | 4.4 | 8.8 | 14.0 |
| Total | Count | 1 | 6 | 12 | 19 | |
| | Expected Count | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | |

Sumber: Data Primer

Dari tabel 5 diketahui bahwa terdapat 1 orang responden pelaksanaannya kurang kinerjanya baik. Sebanyak 1 orang responden pelaksanaan kinerjanya cukup akuntabilitas kinerjanya kurang, 3 orang responden pelaksanaan kinerjanya cukup akuntabilitas kinerjanya cukup, sebanyak 3 orang pelaksanaan kinerjanya baik akuntabilitas kinerjanya cukup dan sebanyak 11 orang pelaksanaan kinerjanya baik akuntabilitas knerja juga baik. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dapat diketahui dari uji data Chi Square pada tabel 6

Tabel 6
(*Chi-Square Tests*) pengaruh pelaksanaan terhadap akuntabilitas kinerja
pada RSUD dr.R.Koesma Tuban

| | Value | Df | Asymp. Sig. (2-sided) |
|------------------------------|-----------|----|-----------------------|
| Pearson Chi-Square | 10.179(a) | 4 | .038 |
| Likelihood Ratio | 11.703 | 4 | .020 |
| Linear-by-Linear Association | 2.720 | 1 | .099 |
| N of Valid Cases | 19 | | |

a 8 cells (88.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .05.

Sumber: Data Primer

Pada tabel Chi-Square test, baris pearson Chi-Square menunjukkan harga α^2 10.179 (a), $df = 4$, dan $p\text{-value} = 0,038 > 0,005$, artinya tidak ada pengaruh antara pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja pada RSUD dr.R.Koesma Tuban. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan pengaruh pelaksanaan anggaran kinerja dengan akuntabilitas kinerja dijabarkan pada tabel 7.

Tabel 7
(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan hubungan anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja

| | Value | Approx. Sig. |
|---|-------|--------------|
| Nominal by Contingency Nominal Coefficient | .591 | .038 |
| N of Valid Cases | 19 | |

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Sumber: Data Primer

Pada tabel 7 (Symmetric Measures), diperoleh nilai contingency Coefficient sebesar 0,591 yang menunjukkan tingkat keeratan pengaruh pelaksanaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja rendah artinya pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja menurut pendapat responden ini adalah agak rendah

Pelaksanaan Anggaran meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah (SEKDA). Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

Pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja Agak rendah pada RSUD dr. R. Koesma terkait dengan pembagian tugas pada pejabat struktural dimana adanya pembagian kegiatan pengadaan barang jasa yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. hal ini disebabkan keterbatasan tenaga yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. Sehingga meskipun secara tugas pokok dan fungsi ada dalam lingkup jabatannya tapi dalam pelaksanaan anggaran responden tersebut tidak ikut melaksanakan sehingga mereka menjawab pelaksanaan anggaran kinerjanya rendah dan cukup.

Pengaruh Pelaporan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengaruh pelaporan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel 8

Tabel 8
(crosstab) pengaruh pelaporan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas

| | | | Akuntabilitas | | | Total |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------|------|-------|
| | | | Kurang | cukup | Baik | |
| Pelaporan | Kurang | Count | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | Expected Count | .1 | .6 | 1.3 | 2.0 |
| | cukup | Count | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | Expected Count | .1 | .6 | 1.3 | 2.0 |
| | Baik | Count | 1 | 4 | 10 | 15 |
| | | Expected Count | .8 | 4.7 | 9.5 | 15.0 |
| Total | Count | 1 | 6 | 12 | 19 | |
| | Expected Count | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | |

Sumber: Data Primer

Pada tabel 8 diketahui bahwa terdapat 1 orang responden pelaporannya kurang akuntabilitas kinerjanya cukup, 1 orang pelaporannya kurang akuntabilitas kinerjanya baik. Sebanyak 1 orang responden pelaporan kinerjanya cukup akuntabilitas kinerjanya cukup, orang responden pelaporannya cukup akuntabilitas kinerjanya baik. Sebanyak 1 orang pelaporannya baik akuntabilitasnya kurang, 4 orang pelaporannya baik akuntabilitas kinerjanya dan sebanyak 10 orang pelaporan kinerjanya baik akuntabilitas kinerja juga baik. Untuk mengetahui pengaruh pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dapat diketahui dari uji data Chi Square pada tabel 9

Tabel 9
(*Chi-Square Tests*) pengaruh pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada RSUD dr.R.Koesma Tuban

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) |
|------------------------------|---------|----|-----------------------|
| Pearson Chi-Square | .950(a) | 4 | .917 |
| Likelihood Ratio | 1.105 | 4 | .893 |
| Linear-by-Linear Association | .075 | 1 | .784 |
| N of Valid Cases | 19 | | |

a 8 cells (88.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11.

Sumber: Data Primer

Pada tabel Chi-Square test, baris pearson Chi-Square menunjukkan harga α_0^2 0.950 (a), $df = 4$, dan $p\text{-value}=0,917 > 0,005$, artinya tidak ada pengaruh antara pelaporan anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja pada RSUD dr.R.Koesma Tuban. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan pengaruh pelaporan anggaran kinerja dengan akuntabilitas kinerja dijabarkan pada tabel 10

Tabel 10
(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan hubungan anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja

| | Value | Approx. Sig. |
|---|-------|--------------|
| Nominal by Nominal Contingency Coefficient | .218 | .917 |
| N of Valid Cases | 19 | |

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Sumber: Data Primer

Pada tabel 10 (Symmetric Measures), diperoleh nilai contingency Coefficient sebesar 0,218 yang menunjukkan tingkat keeratan pengaruh pelaksanaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja rendah artinya pengaruh pelaporan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja menurut pendapat responden ini adalah rendah.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara periodik yang mencakup: Laporan realisasi anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas laporan keuangan (CALK) dimana dalam tugas pokok dan fungsi di RSUD dr.R.Koesma merupakan tugas dari bagian keuangan sehingga wajar saja apabila responden menyatakan bahwa hubungan antara laporan pelaksanaan anggaran dengan akuntabilitas kinerja rendah. Pelaksana anggaran hanya membuat laporan terkait dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan bukan membuat LRA, neraca dan CALK.

Pengaruh Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengaruh Evaluasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel 11

Tabel 11
(Crosstab) pengaruh Evaluasi anggaran berbasis kinerja
terhadap akuntabilitas

| | | | Akuntabilitas | | | Total |
|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------|------|-------|
| | | | Kuran g | cukup | Baik | |
| Evaluasi | Kurang | Count | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | Expected Count | .1 | .3 | .6 | 1.0 |
| | Cukup | Count | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | Expected Count | .1 | .6 | 1.3 | 2.0 |
| | Baik | Count | 0 | 5 | 11 | 16 |
| | | Expected Count | .8 | 5.1 | 10.1 | 16.0 |
| Total | Count | | 1 | 6 | 12 | 19 |
| | Expected Count | | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 19.0 |

Sumber: Data Primer

Pada tabel 11 diketahui bahwa terdapat 1 orang responden Evaluasi anggarannya kurang akuntabilitas kinerjanya kurang, 1 orang Evaluasi anggarannya kurang akuntabilitas kinerjanya cukup. Sebanyak 1 orang responden evaluasi anggarannya cukup akuntabilitas kinerjanya cukup, 1 orang responden evaluasi anggarannya cukup akuntabilitas kinerjanya baik. 5 orang responden evaluasi anggarannya baik akuntabilitas kinerjanya cukup. Sebanyak 11 orang evaluasi anggarannya baik akuntabilitasnya baik. Untuk mengetahui pengaruh pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dapat diketahui dari uji data Chi Square pada tabel 12

Tabel 12
(Chi-Square Tests) pengaruh Evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas
kinerja pada RSUD dr.R.Koesma Tuban

| | Value | df | Asymp. Sig. (2- sided) |
|---------------------------------|-----------|----|---------------------------|
| Pearson Chi-Square | 19.297(a) | 4 | .001 |
| Likelihood Ratio | 8.102 | 4 | .088 |
| Linear-by-Linear Association | 5.786 | 1 | .016 |
| N of Valid Cases | 19 | | |

a 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .05.

Sumber: Data Primer

Pada tabel Chi-Square test, baris pearson Chi-Square menunjukkan harga α_0^2 19.279 (a), $df = 4$, dan $p\text{-value}=0,001 \leq 0,005$, artinya ada pengaruh antara Evaluasi anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja pada RSUD dr.R.Koesma Tuban. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan pengaruh evaluasi anggaran kinerja dengan akuntabilitas kinerja dijabarkan pada tabel 13

Tabel 13
(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan hubungan
anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja

| | | Value | Approx. Sig. |
|--------------------|-------------------------|-------|--------------|
| Nominal by Nominal | Contingency Coefficient | .710 | .001 |
| N of Valid Cases | | 19 | |

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Sumber: Data Primer

Pada tabel 13 (Symmetric Measures), diperoleh nilai contingency Coefficient sebesar 0,710 yang menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara evaluasi anggaran dengan akuntabilitas kinerja adalah cukup. Artinya evaluasi anggaran cukup berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada RSUD dr. R. Koesma Tuban.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja anggaran cukup mempengaruhi akuntabilitas kinerja pada RSUD dr. R. Koesma menunjukkan bahwa pejabat structural mempunyai komitmen untuk selalu melakukan evaluasi anggaran secara periodic. Hal ini dibuktikan dengan 5 orang responden menyatakan melakukan evaluasi anggaran dalam kategori cukup dan 11 orang responden menyatakan melakukan evaluasi anggaran dalam kategori baik.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimulai dari penyusunan Perencanaan Stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini

mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran strategik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja.

Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan, metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Dari uji Chi Square diketahui bahwa faktor perencanaan dan pelaporan pengaruhnya rendah terhadap akuntabilitas, faktor pelaksanaan pengaruhnya agak rendah terhadap akuntabilitas, sedangkan faktor Evaluasi cukup mempengaruhi akuntabilitas.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Enita binawati (2013), yang menyatakan bahwa pengimplementasian anggaran berbasis kinerja terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.

4. KESIMPULAN

1. Implementasi anggaran berbasis kinerja pada RSUD dr. R. Koesma Tuban
 - 1) Dari faktor perencanaan diketahui sebagian besar responden (52,6%) menyatakan kurang terlibat dalam perencanaan, hampir setengahnya (47,5%) responden menyatakan terlibat dengan baik dalam perencanaan.
 - 2) Dari faktor pelaksanaan diketahui sebagian kecil responden (5,3%) menyatakan pelaksanaan anggaran kurang baik, sebagian kecil responden (21,1%) menyatakan pelaksanaan anggaran cukup baik, sebagian besar responden (73,3%) menyatakan pelaksanaan anggaran baik.
 - 3) Dari faktor Pelaporan diketahui sebagian kecil responden (10,5%) menyatakan pelaporan anggaran kurang baik, Sebagian kecil responden (10,5%) menyatakan pelaporan anggaran cukup baik, sebagian besar responden (78,9%) menyatakan pelaporan anggaran baik.
 - 4) Dari Faktor Evaluasi diketahui sebagian kecil responden (5,3%) menyatakan Evaluasi anggaran kurang baik, sebagian kecil responden (10,5%) menyatakan Evaluasi anggaran cukup baik, sebagian besar responden (82,2%) menyatakan Evaluasi anggaran baik..

2. Pencapaian akuntabilitas pada RSUD dr.R.Koesma Tuban diketahui sebagian kecil responden (5,3%) menyatakan bahwa akuntabilitas kurang, hampir separuhnya responden (31,6%) menyatakan akuntabilitas cukup dan sebagian besar responden (63,2%) menyatakan akuntabilitas baik.
3. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas
Dari uji Chi Square diketahui bahwa faktor perencanaan dan pelaporan pengaruhnya rendah terhadap akuntabilitas, faktor pelaksanaan pengaruhnya agak rendah terhadap akuntabilitas, sedangkan faktor evaluasi cukup mempengaruhi akuntabilitas.

Saran

Dari uraian kesimpulan yang telah dikemukakan maka, penulis dapat memberikan saran / masukan bagi pimpinan RSUD sebagai berikut:

1. Hendaknya Pimpinan RSUD dapat lebih mengoptimalkan peran pejabat struktural dalam perencanaan anggaran.
2. Hendaknya RSUD mengadakan Bimbingan teknis pada pejabat struktural RSUD terkait dengan anggaran

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Renstra, Renja tahun 2010 – 2014
- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, RKAKL 2009 – 2012
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 2013, Jakarta:Prenada Media
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2006. *Reformasi Sistem Penganggaran, Konsep dan Implementasi 2005-2007*.Jakarta
- Directorate General of Budget, The Indonesian Budget 2008, Majalah Warta Anggaran, Directorate General of Budget,2008
- Direktorat Jenderal Anggaran, Reformasi Sistem Penganggaran “konsep Dan Implementasi 2005-2007”, Jakarta, 2006
- <http://rintosusantotempirai.blogspot.co.id/2014/10/teori-implementasi-kebijakan-publik.html>
- , 1998, Sindrum R2 Dalam Analisis Regresi Linear Runtun Waktu, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 13, No.4
- , 1999, Pemilihan Model Ekonomi Empirik Dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 14, No.1 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- “Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Jakarta 2009
- Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pedoman Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Jakarta 2009
- Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pedoman Restrukturisasi Program Dan Kegiatan, Jakarta 2009

- Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Langkah Teknis Penyusunan Program dan Kegiatan”, Jakarta 2009
- Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran”, Jakarta 2009
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Jakarta 2005
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Penyusunan Penetapan Kinerja, Jakarta 2005
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi sektor Publik*, Yogyakarta : Andy
- Naniek Pangestuti (2008) : “Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM”, Tesis, Universitas Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan No: 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Sri Rahayu, 2005, Modul Pelatihan Eviews 4.1, UPKFE Universitas Diponegoro, Semarang, Tidak Dipublikasikan
- Suyadi (2006) : “Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran di Indonesia”, Tesis, Universitas Indonesia
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

